

**SIARAN PERS**

## **SMERU Usulkan Pembaruan Garis Kemiskinan Nasional agar Mencerminkan Standar Hidup Layak Minimum**

- SMERU mengusulkan pergeseran standar garis kemiskinan nasional dari batas bertahan hidup menuju standar hidup layak minimum.
- Pembaruan garis kemiskinan dapat memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

**Jakarta, 15 Oktober 2026** — Dalam hampir tiga dekade terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita (harga 2025) naik dari Rp3 juta pada 1999 menjadi Rp7,5 juta pada 2025. Pada periode yang sama, angka harapan hidup meningkat dari 66 menjadi 71 tahun, rata-rata lama sekolah dari 7,5 menjadi 9,5 tahun, dan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi juga meluas.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat telah berkembang sejak metode penghitungan garis kemiskinan nasional ditetapkan pada 1998. Sebagai salah satu dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan, garis kemiskinan merepresentasikan tingkat kesejahteraan minimum yang dianggap layak oleh masyarakat dan pemerintah. Karena itu, The SMERU Research Institute (SMERU) mengangkat kebutuhan pembaruan garis kemiskinan dalam seminar bertajuk **"Apakah Indonesia Memerlukan Metode Penghitungan Garis Kemiskinan Baru?"** pada 15 Oktober 2026, dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan.

### **Garis Kemiskinan Perlu Mengukur Kemampuan Hidup Layak, Bukan Sekadar Bertahan Hidup**

SMERU mengusulkan pembaruan garis kemiskinan agar pengukurannya lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peneliti Senior SMERU, Dr. Ridho Al Izzati, menjelaskan bahwa setelah 28 tahun, pembaruan diperlukan bukan hanya pada komponen penghitungan, tetapi juga pada standar hidup yang menjadi acuannya. "Kami mengusulkan pergeseran dari batas bertahan hidup menuju standar hidup layak minimum, yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle-income country*)," ujar Ridho.

Metode penghitungan garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah *cost of basic needs* (CBN) atau biaya kebutuhan dasar. SMERU mengusulkan agar pendekatan ini tetap digunakan, dengan memperluas cakupan komponen makanan dan menyesuaikan populasi referensi dalam penghitungan. Ridho menjelaskan bahwa standar hidup layak minimum menggambarkan kondisi ketika rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengorbankan kebutuhan makanan demi memenuhi kebutuhan nonmakanan. Dengan pembaruan

ini, pengukuran kemiskinan diharapkan dapat menangkap kondisi kesejahteraan dan kerentanan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si., menjelaskan bahwa BPS telah melakukan berbagai simulasi untuk mengevaluasi pembaruan garis kemiskinan, mulai dari perubahan keranjang komoditas dan metodologi hingga penggunaan pendekatan *total expenditure*. Saat ini, BPS masih menggunakan pendekatan CBN yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori (kcal) per kapita per hari. Di sisi lain, BPS terus mengkaji apakah keranjang komoditas yang digunakan sejak 1998 masih mencerminkan pola konsumsi masyarakat saat ini.

“Melalui pendekatan *total expenditure*, kami menyimulasikan penghitungan garis kemiskinan tanpa membatasi konsumsi masyarakat pada keranjang komoditas tertentu. Penghitungan dilakukan dengan melihat total pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi minimum 2.100 kkal per kapita per hari,” jelas Nashrul. Ia menambahkan bahwa pembaruan garis kemiskinan perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan keterbandingan data dari waktu ke waktu. Tantangan ini semakin penting di tengah beragamnya komoditas makanan yang dikonsumsi masyarakat, sehingga perubahan metode perlu dirancang agar perkembangan tingkat kemiskinan tetap dapat dipantau secara konsisten.

Sementara itu, Peneliti Utama SMERU, Dr. Sudarno Sumarto, menekankan pentingnya menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan mengenai definisi kemiskinan dan garis kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa garis kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan juga mencerminkan pilihan kelompok referensi yang digunakan sebagai dasar pengukuran dan perlu disepakati bersama. Kesepahaman ini penting untuk mengidentifikasi siapa yang tergolong miskin, memahami karakteristik mereka, serta merancang program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

### **Pembaruan Garis Kemiskinan Akan Memengaruhi Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Pembaruan garis kemiskinan nasional tidak hanya menyangkut metode pengukuran, tetapi juga akan memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Peninjauan dan penyempurnaan metode penghitungan garis kemiskinan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan kembali diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, S.T., M.W.R.M., mengatakan pembaruan garis kemiskinan akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan *baseline*, target, dan prioritas program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyesuaian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan berikutnya, termasuk RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Strategi intervensi juga perlu dipertajam berdasarkan karakteristik penduduk miskin dan sebaran kemiskinan di berbagai wilayah.

Pembaruan ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat pilar-pilar penanggulangan kemiskinan, terutama pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan. “Saat ini, program penanggulangan kemiskinan masih didominasi oleh upaya mengurangi beban pengeluaran

masyarakat. Ke depan, kami ingin memperkuat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih berkelanjutan,” jelas Tirta.

Perubahan metode penghitungan garis kemiskinan juga dapat memengaruhi jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, meskipun kondisi ekonomi mereka tidak berubah. “Perubahan jumlah penduduk miskin bisa terjadi karena standar pengukurannya berubah, bukan semata-mata sebagai cerminan memburuk atau membaiknya kondisi ekonomi masyarakat,” jelas Nashrul. Karena itu, Sudarno menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan agar perubahan standar pengukuran kemiskinan dipahami dengan tepat. Dukungan dan komitmen para pengambil keputusan juga diperlukan untuk memastikan proses pembaruan dapat dipahami dan diterima oleh berbagai pihak.

Sebagai lembaga penelitian yang hadir sejak 2001, SMERU secara konsisten mengkaji dinamika kerentanan dan kesejahteraan sosial di tingkat nasional maupun daerah untuk memperkuat kebijakan publik berbasis hasil penelitian. “Karena itu, garis kemiskinan perlu terus dievaluasi agar mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini,” ujar Direktur SMERU, Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St., dalam sambutan pembukanya.

---

### Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:

**Ratri Indah Septiana** (Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi, The SMERU Research Institute)  
[rseptiana@smeru.or.id](mailto:rseptiana@smeru.or.id) | 08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di <https://smeru.or.id/id/event-id/apakah-indonesia-memerlukan-metode-penghitungan-garis-kemiskinan-baru>

---

### **Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)**

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU juga memiliki pengalaman dalam melakukan riset dan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).